

**KENDALA *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM USAHA  
MENGURANGI KASUS PEKERJA ANAK DI INDIA**

**Author : Natasha Callista**

**(email: [natasha.callista2042@student.unri.ac.id](mailto:natasha.callista2042@student.unri.ac.id))**

**Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP.,MA**

**Bibliografi : 20 Buku, 16 Jurnal, 4 Laporan, 33 Website,  
3 Dokumen**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This research analyzes how the Obstacles that faced by the United Nations Children's Fund (UNICEF) in an Effort to reduce the number of child labor cases in India. Child labor in India has resulted in violations of the children's Rights, and increase the risk of many kind violence, exploitation and discrimination. UNICEF as an international organizations dealing with child problems in the World is making efforts to reduce the number of the child laborers in India. The efforts are being made through programs to improve education for children in India, providing shelter and material assistance and participating in efforts to amend the Child Labor Law in India. Efforts are being made to reduce the number and solve the problem of child labor in India.*

*This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles, web sites. This study uses the perspective of Pluralism, the theory of the role of International Organizations.*

*The results of this paper indicate that UNICEF has not been able to act as the main actor in solving the problem of child labor in India, due to obstacles that came from internal or external factors which is assessed from three aspects, Social and Economic Conditions, Ambiguity, and Limited Capacity of UNICEF.*

*Keywords: Obstacles, Child labor, India.*

## PENDAHULUAN

Pekerja anak menurut International Labour Organization (ILO) adalah pekerjaan yang menghilangkan masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak-anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak.<sup>1</sup> Menurut ILO tidak semua jenis pekerjaan yang diberikan kepada anak adalah pekerjaan yang perlu dihapuskan. Pekerja Anak sudah menjadi suatu hal yang mengakar di India sejak kurun waktu yang lama. Berbagai faktor menyebabkan pekerja anak di India terkesan dinormalisasikan di masyarakat India sendiri.

Aturan yang mengatur permasalahan ini mengacu kepada Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum pekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang sektor-sektor pekerjaan yang berbahaya bagi anak, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh anak.<sup>2</sup> Isi dari Konvensi ILO No. 182 sendiri tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk dari Pekerja anak. Konvensi ini lebih bertujuan untuk menarik dan memusatkan perhatian internasional terhadap hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghilangkan bentuk terburuk dari pekerja anak itu sendiri. Beberapa diantara bentuk terburuk dari pekerja anak yang perlu dihilangkan adalah

pekerjaan yang memungkinkan anak mendapatkan pelecehan, pekerjaan yang di lakukan di bawah tanah, air, atau ditinggikan, bekerja dengan membawa beban serta menggunakan peralatan berbahaya, dan bekerja melebihi waktu.<sup>3</sup>

Pemerintah India sendiri sebenarnya telah membuat Undang-Undang yang mengatur tentang pekerja anak yakni Undang-Undang No. 61 Tahun 2016 *The Child Labour Prohibition and Regulation Act*. Undang-Undang yang dibuat pada tahun 1986 ini mengalami berbagai amandemen dan akhirnya disahkan pada tahun 2006 oleh Majelis Tinggi India.

Secara garis besar Undang-undang *Prohibition and Regulation Act* ini berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Melarang anak di bawah usia 15 tahun untuk bekerja.
2. Menetapkan prosedur untuk menambah daftar pekerjaan yang dilarang.
3. Mengatur kondisi kerja anak dalam pekerjaan yang tidak terlarang.
4. Memberlakukan hukuman bagi oknum yang melanggar aturan dalam Undang-undang ini dalam urusan memperkerjakan anak.
5. Menyeragamkan definisi dari “anak” dalam Undang-undang.

Adanya peraturan Internasional dan Undang-Undang domestik India tentang pekerja anak seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan upaya mengurangi pekerja anak di negaranya.

---

<sup>1</sup> International Labour Organization (ILO), *What is Child Labour*, diakses melalui <https://www.ilo.org/ipecc/facts/lang--en/index.htm> pada 3 Januari 2022

<sup>2</sup> Pengusaha dan Pekerja Anak, (2009), *Panduan 1 : Pengenalan terhadap Permasalahan Pekerja Anak/ Organisasi Perburuhan Internasional*, Jakarta: ILO, hal. 10 diakses melalui [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_747329.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_747329.pdf) pada 3 Januari 2022

---

<sup>3</sup> International Labour Child (ILO), op.cit., hal 2

<sup>4</sup> Ankit Kumar Lal dan Khare, Shubham Manoj, (2009) , *Child Labour in India; Situation and Policy Analysis*, National Law Institute University, Bhopal

Pada kenyataan di lapangan, kasus pekerja anak yang terjadi di India masih dikategorikan sebagai salah satu permasalahan yang patut untuk dilirik oleh internasional karena jumlahnya yang masih cukup banyak.

Menurut sensus yang dilakukan UNICEF dengan pemerintah di India, jumlah pekerja anak pada rentang usia 5-14 tahun adalah 12,7 juta anak dan pada rentang usia 15-18 tahun sebanyak 33 juta anak.<sup>5</sup> Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terdaftar dalam sensus, diperkirakan praktek pekerja anak illegal melebihi data yang telah ada dan tidak terdaftar melalui sensus. Hal ini dikarenakan terdapat 75 juta anak lainnya dalam sensus yang tidak bersekolah namun tidak diketahui pula aktifitas sehari-harinya.<sup>6</sup> UNICEF memperkirakan bahwa anak yang tidak terdaftar aktivitasnya inipun banyak terlibat dalam pekerja anak illegal yang ada di India. Banyak pekerja anak di India yang bersifat illegal menyebabkan sejumlah pekerja anak tidak terdata karena berada di luar jangkauan statistik perburuhan konvensional. Berdasarkan data pekerja anak lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan India dengan persentase sebanyak 75,2% dan di wilayah perkotaan hanya berjumlah 24,8%. Hal itu karena pekerja anak paling banyak ditemukan di sektor pertanian. Aturan terkait pekerja anak dinilai tidak diimplementasikan secara sepenuhnya dikarenakan masih

banyaknya jumlah pekerja anak di India sampai sekarang.

Berangkat dari keresahan UNICEF terhadap anak-anak di India, UNICEF telah melakukan berbagai upaya untuk membantu permasalahan anak di India. Dalam pelaksanaannya, UNICEF mengalami berbagai kendala yang harus mereka hadapi untuk mengurangi kasus pekerja anak di India. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat sebuah rumusan masalah **“Bagaimana Kendala yang dihadapi United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Usaha Mengurangi Kasus Pekerja Anak di India?”**

## KERANGKA TEORI

### Perspektif : Pluralisme

Penelitian dengan tema kendala yang dihadapi UNICEF dalam usaha mengurangi kasus pekerja anak di India, penulis memilih menggunakan perspektif pluralisme. Pluralis berpendapat bahwa sistem internasional tidak hanya ditentukan oleh aktor Negara, tetapi ada aktor-aktor lain non negara. Pluralis memandang isu hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas dan cenderung memfokuskan pada isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Pembahasan pluralism meluas ke kasus sosial, ekonomi, dan masalah lingkungan, tidak hanya membahas tentang keamanan nasional dan internasional saja.

Aktor non Negara adalah suatu faktor yang sangat krusial dalam hubungan internasional. Organisasi internasional berperan penting dan dapat

---

<sup>5</sup> Government of India, *Census of India 2011*, Ministry of Labour and Employment, India, 2019

<sup>6</sup> An Empirical Study of Socio-legal Problems of Child Labour with Special reference to Gulbarga city in Karnataka, (2011), *Concept of Child Labour and Factors Leading to Child Labour*, diakses melalui <http://hdl.handle.net/10603/8530> pada 11 Agustus 2021

---

<sup>7</sup> Muh. Fathun Laode, (2017), review buku *“Human Rights in International Relations”*, Hal. 169

melakukan berbagai upaya untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.

### **Teori : Peran Organisasi Internasional**

Organisasi memiliki peranan untuk membuat dan mempertahankan berbagai aturan. Aturan itu dibuat guna untuk mencapai tujuan bersama dan agar berjalan tertibnya berbagai hal yang perlu diatur dalam sistem internasional. Organisasi internasional juga berperan penting dalam memberikan ruang untuk negara-negara menjalin hubungan internasional guna kepentingan bersama.<sup>9</sup>

Tiga peranan organisasi internasional menurut Clive Archer:<sup>10</sup>

1. Organisasi sebagai instrumen dan sarana diplomasi berbagai negara. Serta organisasi internasional menjadi salah satu cara untuk meraih kepentingan bersama.
2. Organisasi sebagai arena atau wadah untuk para negara anggotanya mengadakan pertemuan dan berkumpul.
3. Organisasi internasional sebagai aktor yang mandiri dalam sistem internasional. Organisasi internasional diharapkan mampu untuk memberi pengaruh terhadap reaksi suatu aktor terhadap aktor lainnya.

---

<sup>8</sup> Nadhire Qamara, (2017), Skripsi: “*Peran WHO dalam Mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan*” (Bandung: UKP,2017)

<sup>9</sup> Le Roy A. Bennet,(1997), *International Organizations: Principles and Issues*, New Jersey: Prentice Hall Inc

<sup>10</sup> Rudy T. May,(2009), “*Administrasi dan Organisasi Internasional*”, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal.2

Dalam menjalankan perannya, UNICEF mengalami berbagai kendala. Kendala yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal UNICEF menghambat UNICEF dalam mencapai tujuannya mengurangi jumlah pekerja anak di India.

## **METODE**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dimana penulis mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena serta permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang akan dianalisis oleh penulis.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui data sekunder. Data dapat didapatkan melalui *internet based methods* dan *library research*. Data mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan pekerja anak yang ada di India diakses baik itu berbentuk buku, jurnal, berita dan artikel serta laporan-laporan resmi dari UNICEF.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran UNICEF dalam Usaha Mengurangi Kasus Pekerja Anak di India:**

#### **1. Peran UNICEF sebagai Instrumen**

Melalui koordinasi multilateral yang dilakukan melalui berbagai program kerjasama untuk mencapai tujuan bersama negara-negara anggotanya, UNICEF dan pemerintah India membuat suatu rancangan penanganan permasalahan pada anak di India. Rancangan tersebut bernama *Country*

*Programme Action Plan* atau CPAP dengan program utamanya berkaitan dengan pengupayaan kesejahteraan ibu dan anak.<sup>11</sup>

Fokus UNICEF dalam usaha mengurangi pekerja anak mengacu kepada poin nomor dua pada program utama CPAP yaitu, perlindungan terhadap anak di lingkungannya dan kesetaraan akses pendidikan. Untuk mewujudkan rancangan program nomor 2 terkait perlindungan anak tersebut dibentuk suatu skema perlindungan anak yang disebut dengan *Integrated Child Protection Scheme* (ICPS). ICPS berlandaskan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Bertujuan untuk melembagakan layanan untuk penjangkauan darurat, perawatan berbasis keluarga dan masyarakat, dibentuknya wadah untuk konseling dan memberikan dukungan.

ICPS mengadopsi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang layak untuk anak. Metode yang digunakan adalah dengan dialog generasi di setiap kalangan, dan membuat struktur perlindungan berbasis masyarakat. Beberapa program dari ICPS antara lain:

1. Layanan darurat pada anak : pembentukan layanan darurat pada anak “Childline” kepada anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan medis baik secara darurat maupun jangka panjang. Childline beroperasi pada 291 wilayah melalui mitranya.

2. Pembentukan tempat penampungan terbuka yang menyediakan ruang bagi anak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.
3. Sponsorship dan program asuh : tiap distrik akan diberikan sejumlah uang untuk membantu berjalannya program ini. Program lainnya adalah menyediakan orang tua angkat sementara untuk keluarga yang kesulitan mengasuh dan membesarkan anak mereka.
4. Membentuk rangkaian aturan untuk melakukan adopsi pada anak
5. Dukungan keuangan kepada anak yang mencapai usia 18 tahun untuk membantu transisi mereka menuju kehidupan mandiri.
6. Program Intervensi berbasis kebutuhan dan bersifat inovatif : dibentuknya program khusus untuk anak-anak yang membutuhkan seperti anak-anak yang post rehabilitasi bencana, anak pekerja seks, anak narapidana. Lembaga Perlindungan Anak Negara Bagian ikut memberikan bantuan dana terhadap program ini.

UNICEF menjadikan ICPS sebagai pedoman dalam penerapan program, pada awal kemunculan ICPS terjadi beberapa hambatan dikarenakan penerapannya tidak dilakukan secara menyeluruh ke semua wilayah di India. UNICEF secara langsung turun tangan dalam upaya penyelesaian hambatan. Untuk mendukung terwujudnya ICPS, UNICEF membentuk sebuah perangkat pelacak yang biasa disebut *Child Protection Information Management System*. Penggunaan alat pelacak dibuat dengan tujuan memudahkan melacak permasalahan yang terjadi pada anak, sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta melacak sejauh mana implementasi

---

<sup>11</sup> UNICEF, (2012), *Country Programme Action Plan 2013-2017*, disahkan pada 14 September 2012

dari undang-undang perlindungan pada anak di masyarakat. Alat ini telah tersebar ke 38 distrik di India.<sup>12</sup> Upaya lain UNICEF terkait penerapan ICPS adalah dengan kembali mengangkat kembali permasalahan pekerja anak ini sebagai salah satu permasalahan utama di tingkat nasional. Dengan tujuan agar permasalahan pekerja anak yang terjadi menjadi perhatian public.

Kerjasama UNICEF dilakukan dengan *Ministry of Labour and Employment* dilakukan dalam melakukan analisis data dari sensus terkait wilayah penyebaran pekerja anak di India. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar UNICEF dapat mengidentifikasi wilayah dengan jumlah pekerja yang lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya, sehingga UNICEF dapat mengarahkan fokus kepada wilayah yang lebih membutuhkan bantuan dari UNICEF. Jharkhand dan Bihar adalah salah satu wilayah terbelakang di India yang membutuhkan fokus lebih. UNICEF kemudian membuat suatu program *Child Friendly School*. Program *Child Friendly School* memungkinkan anak di wilayah Jharkhand dan Bihar mendapatkan kemudahan akses dari segi edukasi.

## 2. Peran UNICEF sebagai Wadah

Upaya mengurangi pekerja anak di India yang dilakukan UNICEF selanjutnya adalah dengan membuat *Alternative Learning Centre (ALC)*. ALC merupakan *output* dari kemitraan UNICEF dengan 180 NGO, dan otoritas pendidikan India. Adanya ALC bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat anak dalam menempuh pendidikan dasar mereka, dari yang seharusnya 5 tahun

menjadi 3 tahun. Motivasi dari dibentuknya ALC adalah karena pendidikan merupakan hal penting yang memengaruhi jumlah pekerja anak.

Pada tahun 2019, sebanyak 200 ALC aktif dalam *children development* dengan bantuan dana dari berbagai pihak salah satunya IKEA yang merupakan perusahaan furnitur terbesar di dunia.<sup>13</sup> Lulusan dari ALC ini nantinya akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.<sup>14</sup>

Upaya peningkatan tingkat pendidikan di India dilakukan UNICEF melalui program meningkatkan tenaga kerja pendidik bagi anak. UNICEF dibersamai oleh departemen pendidikan membantu memperkuat kurikulum atau materi pendidikan serta mengatur silabus pada pendidikan untuk anak di daerah rural. UNICEF bekerjasama dengan *National Labour Institute* untuk membuat pelatihan kepada tenaga kerja pendidik.<sup>15</sup> Tenaga pendidik di India sendiri memang masih terbilang kurang cakap karena kebanyakan dari tenaga pendidik di India gagal dalam Tes Kelayakan Guru. UNICEF dan National Labour Institute membentuk modul pelatihan untuk tenaga pendidik. Modul pelatihan tersebut berisi hal yang berkaitan dengan pekerja anak dari segi cara mencegah maupun penanggulangannya. Modul tersebut berjudul “Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward”.

---

<sup>12</sup> UNICEF, Annual Report 2018, Diakses melalui <https://www.unicef.org/india/reports/annual-report-2018> pada 3 Maret 2022

---

<sup>13</sup> UNICEF, *Breaking Vicious Cycle to Save Children from Trafficking*, diakses melalui <https://www.unicef.org/india/stories/breaking-vicious-cycle-save-children-trafficking> pada 3 Maret 2022

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Loc.Cit, UNICEF Annual Report 2018

### 3. Peran UNICEF sebagai Aktor

Upaya UNICEF dalam mengurangi pekerja anak sebagai perannya sebagai aktor dapat dilihat dari usaha UNICEF mendorong pemerintah India melakukan amandemen bahkan penghapusan terkait Undang-undang *Child Labour Prohibition and Act*. Secara tidak langsung, UNICEF menunjukkan keikutsertaannya dalam mengintervensi politik. UNICEF beranggapan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah India mengindikasikan ketidakpatuhan India terhadap berbagai konvensi terkait penghapusan pekerja anak yang telah diratifikasi oleh negara India sendiri.

Undang-undang yang dibuat India dinilai dapat menimbulkan kebingungan bagi aturan pekerja anak di negara India. Oleh karena itu UNICEF berperan sebagai aktor melakukan pengawasan terhadap implementasi dari undang-undang pekerja anak yang dibuat oleh pemerintah India. UNICEF mendukung adanya pengembangan pada peraturan sehingga peraturan terkait pekerja anak menjadi lebih jelas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perlindungan pada anak yang bekerja.

Kedua, *Conditional Cash Transfer Scheme* (CCT) salah satu bentuk upaya UNICEF untuk memberikan bantuan berupa uang tunai. Bantuan disalurkan kepada sejumlah keluarga yang kekurangan secara berkala. Bantuan diberikan kepada keluarga yang bersedia memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh UNICEF sebagai pemberi bantuan. Kewajiban yang perlu dipenuhi adalah seperti bersedia mengikuti berbagai program kesehatan dan pendidikan kepada anak dari keluarga mereka. UNICEF bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan kepada para orang tua untuk

menjalankan program yang menguntungkan bagi anak dari keluarga mereka.<sup>16</sup>

### **Kendala yang dihadapi UNICEF dalam Usaha Mengurangi Jumlah Pekerja Anak**

#### **1. Kondisi Sosial dan Ekonomi di India Sistem Kasta di India**

Keikutsertaan anak dalam bekerja telah ada di India sejak kurun waktu yang lalu. Seorang anak dari keluarga berkasta pekerja atau rendah diwajibkan untuk bekerja dalam berbagai sektor bidang pekerjaan. Anak dari keluarga dengan kasta rendah memiliki resiko eksploitasi lebih besar.<sup>17</sup>

Kasta rendah cenderung menerima pekerjaan walaupun dengan upah rendah dan menyebabkan mereka terjebak dalam eksploitasi demi melunasi hutang maupun memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Seperti contoh Kasta Dalit yang biasanya tidak memiliki apapun sebagai sumber penghidupan mereka, lalu menjadi ketergantungan dengan tuannya. Pekerja anak ini tidak akan berani melawan saat terjadi berbagai pelanggaran atas dirinya dikarenakan kesadaran akan rendahnya kasta mereka. Kasta tinggi mayoritas mendominasi pekerjaan di berbagai bidang pemerintahan, politik, komite pekerja anak, dan kepolisian.<sup>18</sup> Sehingga

---

<sup>16</sup> UNICEF, Social Protection Evaluation, diakses melalui <https://www.unicef.org/social-policy/social-protection> pada 5 Maret 2022

<sup>17</sup> Kompas.com, (2020), *Perempuan Dalit: Kami Korban Kekerasan Karena Miskin dan Kasta Rendah*, diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/11/114608270/perempuan-dalit-kami-korban-kekerasan-karena-miskin-dari-kasta-rendah> pada 13 Maret 2022

<sup>18</sup> Human Rights Watch, (2019), *Caste-based Discrimination and Bonded Labour*, diakses melalui

untuk memutus rantai pekerja anak di India cukup rumit dengan adanya system kasta ini.

Hal ini berpengaruh kepada tidak efektifnya segala macam bentuk instrument maupun rancangan dan program dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menghentikan fenomena pekerja anak. Kesadaran masyarakat India terhadap kasta rendah yang mereka miliki membuat tidak adanya pergerakan dari individu ataupun kelompok terkecil untuk melawan sistem yang telah ada.

Perlu adanya perombakan bertahap dan besar-besaran dalam konstruksi sosial di India terhadap sistem kasta. Perubahan ini bukan hal yang dapat semata-mata diubah dalam waktu yang singkat, perubahan ini membutuhkan keterlibatan dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah untuk merubahnya. Hal ini yang membuat UNICEF harus menelaah ke akar permasalahan pekerja anak yakni system kasta di India. Namun, sampai saat ini UNICEF masih belum mampu untuk merombak system kasta yang mengakar di India dilihat dari masih banyak ditemukan kasus pekerja anak yang bekerja dengan alasan karena mereka adalah anak dengan kasta pekerja dan rendahnya kasta mereka miliki.

### **Tingkat Kemiskinan yang Tinggi dan Pendidikan yang Rendah**

Kendala lainnya berkaitan dengan kondisi ekonomi dari negara India yang cukup rendah. Ketidapatuhan masyarakat India terkait berbagai aturan larangan adanya pekerja anak terjadi karena kondisi kemiskinan dan pendidikan yang ada di India. Menurut data Komite nasional, Masyarakat di

---

<https://www.hrw.org/reports/2003/india/India0103-04.htm> pada 13 Maret 2022

India memiliki tingkat kemiskinan pada garis angka \$0,46 atau setara dengan Rs 32 pada daerah perdesaan dan angka \$0.56 atau setara dengan Rs 47 di perkotaan.<sup>19</sup> Menurut Sensus, 68,8% masyarakat India hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>20</sup> Hal ini menyebabkan keterkaitan masyarakat India terhadap pekerja anak sangat erat. Kemiskinan merupakan faktor dan kendala terbesar yang dihadapi UNICEF dan pemerintah India sendiri dalam mengatasi permasalahan jumlah pekerja anak di negara India.

Sebanyak 2/3 masyarakat India yang terjerat kemiskinan, mengirim anak mereka bekerja tanpa memerhatikan resiko kedepan yang berakibat pada anak. Kemiskinan berhubungan dengan pendidikan. Mayoritas anak dari keluarga dengan kategori miskin di India, tidak menduduki bangku pendidikan. Pada beberapa keluarga yang mengirim anak mereka ke sekolah dan bekerja sekaligus, menghasilkan anak dengan kinerja yang tidak maksimal di kedua hal tersebut. Hal ini terjadi sejak lama dan berkelanjutan. Akibat dari siklus kemiskinan dan tidak mendapat pendidikan mengakibatkan India terus menghasilkan tenaga kerja pendidik yang kurang berkualitas.

Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas di India menjadi salah satu tantangan UNICEF dan pemerintah India untuk mengadakan pelatihan secara menyeluruh untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas. Selain tenaga kerja pendidik, sekolah di India dinilai

---

<sup>19</sup> New Poverty Line: Rs 32 for Rural India, Rs 47 for Urban India

<sup>20</sup> SOS Children Village, Poverty in India: Facts and Figures on The Daily Struggle for Survival, diakses melalui <https://www.soschildrensvillages.ca/news/poverty-in-india-602> pada 14 Maret 2022

kurang memadai untuk proses belajar mengajar yang efektif.<sup>21</sup> Menurut laporan UNICEF, Sebanyak 5% sekolah di India dinilai tidak layak, 60% dari sekolah di India tidak memiliki arus listrik didalamnya, dan 40% sekolah *over capacity* dengan siswa perkelas yang tidak sesuai. Dengan kondisi seperti ini, motivasi orang tua untuk mengirim anak mereka bersekolah akan menurun dan memutuskan anak untuk lebih baik bekerja karena dinilai lebih menghasilkan.

Siklus kemiskinan dan pendidikan rendah yang terjadi secara berkelanjutan beresiko membuat orang tua memiliki pola pikir yang sempit terkait masa depan anak. Orang tua menganggap pendidikan bukanlah hal yang penting, dan lebih memilih anak untuk bekerja dengan alasan anak akan memiliki keterampilan kerja sejak kecil.

### ***Bonded Child Labor***

Fenomena memperkerjakan anak dalam perbudakan yang bertujuan untuk melunasi hutang orang tua mereka disebut dengan *Bonded Child Labour* atau Pekerja Terikat. Masyarakat India. Di India sumber alternative kredit terbatas, sehingga keluarga dari golongan kurang mampu mayoritas beralih kepada rentenir lokal. Orang tua kerap kali menjadikan anak sebagai komoditas pertukaran untuk memenuhi dan membayar hutang yang telah mereka pinjam kepada para rentenir lokal.

---

<sup>21</sup> India Today, (2019), *32 Million Indian Children Have Never Been to Any School: How Can We Reform Education for the Underprivileged?*, diakses melalui <https://www.indiatoday.in/education%02today/featurephilia/story/32-million-indian-children-have-never-been-to-any-school-how-can-we%02reform-education-for-the-underprivileged-1582293> pada 14 Maret 2022

Anak dikirimkan untuk bekerja dengan rentang waktu yang tidak menentu karena kontrak yang biasa dibuat oleh orang tua dan oknum yang memperkerjakan anak bersifat informal. Mayoritas pekerja anak yang terikat mengalami eksploitasi, baik dari tenaga, upah yang tidak memadai, jam kerja, dan yang lainnya. Para pekerja anak lebih diminati sebagai komoditas pertukaran atau sebagai pelunas hutang karena imbalan yang mereka dapat lebih kecil daripada pekerja dewasa. Hal ini menguntungkan bagi tuannya dan dapat memperkerjakan anak lebih lama. Diperkirakan sebanyak 15 juta anak di India terlibat *Bonded Child Labour* atau bekerja sebagai pekerja terikat. Pada beberapa industry, anak dijadikan sebagai pelunas bunga pinjaman dan bukan sebagai pelunas pinjaman awal.

### **Pandemi COVID-19**

Dalam laporan tahunan UNICEF memperkirakan bahwa sejak Covid-19 sekitar 250 juta anak India terkena dampaknya akibat *lockdown* yang diberlakukan. Ribuan anak kemudian memutuskan untuk ikut dengan orang tuanya bekerja demi mendukung keuangan keluarga. Menurut Claudia Cappa ahli spesialis statistic UNICEF, jumlah pekerja anak pada masa Pandemi Covid-19 diperkirakan bias naik mencapai angka 46 juta anak pada akhir tahun 2021.

Peningkatan jumlah pekerja anak akibat Covid-19 ini tidak hanya terjadi di negara India melainkan seluruh dunia. Direktur Eksekutif UNICEF pada tahun 2020, Henrietta Fore mengakui adanya ketertinggalan dalam menangani permasalahan pekerja anak di seluruh

dunia.<sup>22</sup> Mayoritas pekerja anak yang banyak dijadikan pekerja pada masa Pandemi Covid-19 adalah rentang usia 5-11 tahun. Alasan pekerja anak dengan usia 5-11 tahun lebih banyak ditemukan karena upah yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan memperkerjakan pekerja dewasa.

Upah yang dikeluarkan untuk pekerja anak hanya sekitar \$28 atau Rs. 2000 senilai dengan Rp.420.000,- per bulannya.<sup>23</sup> Untuk pekerja dewasa sendiri tercatat kenaikan angka pengangguran sebanyak 8% menurut Survei pada Desember 2020 yang dilakukan Pusat Pemantauan Ekonomi India.

## 2. Kerancuan atau Ambiguitas

Ambiguitas ini dapat terjadi karena di India sendiri persepsi mengenai anak yang bekerja merupakan hal yang biasa terjadi sejak lama, bahkan merupakan suatu bentuk budaya bentuk rasa hormat kepada orang tua. Aturan yang telah dibentuk di India secara tidak langsung tidak ditegakkan dengan semestinya, karena adanya persepsi yang kuat di masyarakat tersebut. Persepsi tentang anak yang bekerja dari India berbeda dengan persepsi UNICEF. Hal ini menyebabkan, kesulitan UNICEF membuat perubahan skala besar di India semakin meningkat.

Ambiguitas dan persepsi yang berbeda ini adalah penyebab ketidakpatuhan masyarakat di India. Tingkatan paling rendah yakni individu di India mayoritas masih menganut nilai sosial dan budaya memperkerjakan anak.

Sulit mengimplementasikan aturan yang telah dibuat terkait permasalahan mengurangi jumlah pekerja anak. Meskipun adanya perhatian internasional terhadap permasalahan ini, jika pola pikir mereka masih menormalisasikan pekerja anak maka akan sulit untuk mengurangi jumlah pekerja anak di negara India.

UNICEF sebagai wadah kerjasama pihak-pihak luar dan organisasi lain mengupayakan program-program meminimalisir pekerja anak, tetapi tantangan terbesarnya adalah merubah perspektif masyarakat di India terkait pentingnya kesadaran akan bahaya *Child Labour* bagi anak. Meskipun kampanye-kampanye bahaya *Child Labour* dilakukan bersama dengan banyak pihak internasional, tidak menutup kemungkinan bahwa kampanye tersebut tidak memengaruhi persepsi masyarakat india terkait fenomena pekerja anak.

Faktor lain terjadinya kerancuan dalam aturan yang ada karena faktor bahasa dalam perjanjian internasional. Cakupan bahasa yang digunakan dalam berbagai aturan internasional cenderung terlalu umum. Cakupan bahasa yang umum ini mengakibatkan interpretasi dari tiap-tiap negara berbeda terkait aturan internasional yang ada. Perlu dilakukannya diskusi dan pembahasan yang lebih mendalam terkait semua aturan, konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan terkait hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh negara terkait permasalahan pekerja anak. Dilakukannya diskusi dan pembahasan lebih lanjut bertujuan untuk menciptakan keselarasan bagi semua negara terkait pengartian dari setiap aturan pekerja anak.

---

<sup>22</sup> Dw.Com, (2020), *PBB: Pekerja Anak Melonjak Untuk Pertama Kalinya dalam 20 Tahun Terakhir*, diakses melalui <https://www.dw.com/id/pekerja-anak-melonjak-untuk-pertama-kalinya-dalam-20-tahun/a-57837056> pada 17 Maret 2022

<sup>23</sup> TATOHI Jurnal Ilmu Hukum

### 3. Keterbatasan Kapasitas dari UNICEF

UNICEF berperan dalam memengaruhi India melakukan amandemen terkait UU *Prohibition and Act Child Labour*, hingga terjadinya amandemen. Undang-undang India terkait pekerja anak ini sejak awal kemunculannya menimbulkan kontroversi. Legalisasi undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah India mendukung anak dinegaranya untuk bekerja. Hal ini membuat UNICEF ikut bergerak menunjukkan keikutsertaan UNICEF dalam memengaruhi ranah politik India dalam permasalahan pekerja anak. UNICEF menuntut adanya amandemen pada undang-undang guna untuk keselarasan usia 'anak', dan menambah kategori pekerjaan yang dilarang untuk anak. Meskipun berbagai perubahan dilakukan, Undang-undang *Prohibition and Act Child Labour India* sendiri masih menjadi pembahasan karena menimbulkan permasalahan jangka panjang terkait ketenagakerjaan.

Kekurangan UNICEF dalam menangani permasalahan pekerja anak di India pada tahun 2016-2020 adalah UNICEF memiliki kapasitas tersendiri untuk menangani suatu permasalahan. UNICEF belum mampu mengurangi angka pekerja anak di India secara keseluruhan karena upaya-upaya UNICEF difokuskan pada wilayah tertentu di India. Permasalahan pekerja anak banyak yang belum terjangkau oleh UNICEF sendiri karena keterbatasan kapasitas UNICEF. Dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan yang telah memburuk di India sangat besar, namun tentu tidak semua dana dari UNICEF dialihkan hanya untuk program *child protection* untuk pekerja anak di India. Di India sendiri focus UNICEF

banyak terbagi kepada permasalahan krusial lainnya yang terdapat di India, seperti *child marriage* dan sanitasi. Ditambah lagi dengan keadaan global yang menurun akibat pandemic Covid-19 yang membuat UNICEF sebagai organisasi internasional perlu mencari jalan keluar lain dari setiap permasalahan pekerja anak karena sejak masa pandemic semua hal yang berkaitan dengan rancangan program maupun upaya lain terkendala karena adanya perubahan kondisi dunia. Karena itulah upaya yang perlu dilakukan UNICEF dijalankan secara bertahap dan menyesuaikan dengan keadaan dunia saat ini.

Upaya UNICEF dalam perubahan Undang-undang agar lebih terarah dan jelas telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya pemerintah India yang seharusnya memiliki peran lebih besar. UNICEF menilai badan hukum India masih lemah dalam menangani permasalahan pekerja anak. Para oknum yang memperkerjakan anak masih sangat banyak dan tidak diberlakukan sanksi kepada oknum. Praktek illegal memperkerjakan anak tidak sedikit ditemukan dan masih bebas melakukan kegiatan memperkerjakan anak dibawah umur. UNICEF memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengawasi dan mengontrol jalannya implementasi dari Undang-undang tersebut karena dari pemerintah India masih lalai menegakan hukum terkait permasalahan pekerja anak.

Tanpa adanya *political will* yang besar dari India untuk mengurangi permasalahan pekerja anak, maka fenomena pekerja anak ini tidak akan pernah selesai. UNICEF disini berperan hanya sebagai organisasi internasional yang membantu mengurangi kasus pekerja anak di India, Pemerintah India adalah aktor utama dalam penyelesaian

fenomena pekerja anak di India. Pemerintah India adalah pihak yang mempunyai kekuasaan penuh untuk masalah internal negaranya. Dengan demikian, upaya yang dilakukan UNICEF dengan tujuan yang ingin diraih UNICEF untuk menghilangkan pekerja anak di India akan terhambat dan terhalangi oleh tindakan dari India sendiri.

## **KESIMPULAN**

Kendala yang dihadapi oleh UNICEF dapat ditemukan dari faktor internal maupun eksternal yang berasal dari negara India. tiga aspek utama yang dianggap sebagai kendala yang dihadapi UNICEF dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di India yakni kondisi sosial dan ekonomi, kerancuan dan ambiguitas serta keterbatasan kapasitas UNICEF dalam menangani permasalahan yang terjadi.

Dari segi kondisi sosial dan ekonomi, India memiliki permasalahan internal yang rumit yang mengakibatkan pekerja anak menjadi salah satu hal yang dinilai biasa di negara India, yakni permasalahan ekonomi dan pendidikan di India yang rendah dan budaya bekerja pada anak yang ada di India. Ambiguitas terjadi karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan India menjalankan peraturan terkait permasalahan pekerja anak. Dan terakhir dari segi keterbatasan kapasitas dari UNICEF untuk menangani lebih dalam permasalahan ini. Pemerintah India masih belum totalitas dalam usaha menyelesaikan kasus pekerja anak di negara India, sehingga UNICEF sendiri menghadapi kendala yang besar dari permasalahan internal yang tidak mampu pemerintah India sendiri tangani.

Jumlah pekerja anak di India meningkat sejak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa UNICEF belum

mampu berperan sebagai aktor tunggal untuk menyelesaikan permasalahan pekerja anak di India. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dari pemerintah India sendiri dalam menyelesaikan kasus permasalahan pekerja anak di India karena permasalahan pekerja anak di India ini telah mengakar dalam budaya India dan perlu keinginan dan usaha yang kuat dari pemerintah India sendiri untuk menghentikan praktek pekerja anak di India.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Lal, Ankit Kumar and Khare, Shubham Manoj. (2009). *Child Labour in India; Situation and Policy Analysis*. National Law Institute University, Bhopal

Nadhira Qamara, (2017), Skripsi: “*Peran WHO dalam Mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan*” (Bandung: UKP,2017)

Norma Rizqita Latukaisupy, Arman Anwar, Dyah Ridhul Airin Daries. (2021). Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 , No.1

Moosvi. Shireen. (2011). The World of Labour in Mughal India (c. 1500-1750). *International Review of Social History*. Vol. 56

### **Buku**

Archer, Clive. (2001). *International Organizations*. Taylor and Francis e-Library

ILO and UNICEF. (2020). *COVID-19 and Child Labour: A time of crisis, a time to act*. ILO and UNICEF: New York

Pengusaha dan Pekerja Anak. (2009). *Panduan 1 : Pengenalan terhadap Permasalahan Pekerja Anak/ Organisasi Perburuhan Internasional*. Jakarta: ILO. diakses melalui [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_747329.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_747329.pdf)

Le Roy A. Bennet,(1997), *International Organizations: Principles and Issues*, New Jersey: Prentice Hall Inc

Rudy T. May,(2009), “*Administrasi dan Organisasi Internasional*”, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal.2

### **Internet**

International Labour Organization (ILO). *What is Child Labour*. diakses melalui <https://www.ilo.org/ipecc/facts/lang--en/index.htm>

An Empirical Study of Socio-legal Problems of Child Labour with Special reference to Gulbarga city in Karnataka, (2011), *Concept of Child Labour and Factors Leading to Child Labour*, diakses melalui <http://hdl.handle.net/10603/8530>

UNICEF, Annual Report 2018, Diakses melalui <https://www.unicef.org/india/reports/annual-report-2018>

UNICEF, *Breaking Vicious Cycle to Save Children from Trafficking*, diakses melalui <https://www.unicef.org/india/stories/breaking-vicious-cycle-save-children-trafficking>

UNICEF, Social Protection Evaluation, diakses pada 5 Maret 2022 melalui <https://www.unicef.org/social-policy/social-protection>

Kompas.com, (2020), *Perempuan Dalit: Kami Korban Kekerasan Karena Miskin dan Kasta Rendah*, diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/11/114608270/perempuan-dalit-kami-korban-kekerasan-karena-miskin-dari-kasta-rendah> pada 13 Maret 2022

Human Rights Watch, (2019), *Caste-based Discrimination and Bonded Labour*, diakses melalui <https://www.hrw.org/reports/2003/india/India0103-04.htm> pada 13 Maret 2022

SOS Children Village, *Poverty in India: Facts and Figures on The Daily Struggle for Survival*, diakses melalui <https://www.soschildrensvillages.ca/news/poverty-in-india-602> pada 14 Maret 2022

India Today, (2019), *32 Million Indian Children Have Never Been to Any School: How Can We Reform Education for the Underprivileged?*, diakses melalui <https://www.indiatoday.in/educatio>

[n%02today/featurephilia/story/32-million-indian-children-have-never-been-to-any-school-how-can-we%02reform-education-for-the-underprivileged-1582293](https://www.foxnews.com/story/32-million-indian-children-have-never-been-to-any-school-how-can-we-reform-education-for-the-underprivileged-1582293) pada 14 Maret 2022

Dw.Com, (2020), *PBB: Pekerja Anak Melonjak Untuk Pertama Kalinya dalam 20 Tahun Terakhir*, diakses melalui [https://www.dw.com/id/pekerja-](https://www.dw.com/id/pekerja-anak-melonjak-untuk-pertama-kalinya-dalam-20-tahun/a-57837056)

[anak-melonjak-untuk-pertama-kalinya-dalam-20-tahun/a-57837056](https://www.foxnews.com/story/32-million-indian-children-have-never-been-to-any-school-how-can-we-reform-education-for-the-underprivileged-1582293) pada 17 Maret 2022

#### **Dokumen**

Government of India, *Census of India 2011*, Ministry of Labour and Employment, India, 2019

UNICEF, (2012), Country Programme Action Plan 2013-2017, disahkan pada 14 September 2012